

TESIS

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS
PERLINDUNGAN KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DENGAN
SISTEM SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor:
604/Pdt.G/2020/PA. Bkt)**



**Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang
2023**

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PERLINDUNGAN KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DENGAN SISTEM SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Muhammad Nur Idris ,2120113017 Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2023, 124 Halaman

ABSTRAK

Perkembangan penduduk yang pesat dan perkembangan ekonomi yang tidak stabil berdampak pada sulitnya individu untuk dapat memiliki rumah yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang baik dan layak huni, masyarakat membeli perumahan melalui pengembang perumahan. Namun dalam perkembangan bisnis perumahan bisa menjadi celah bagi pihak pengembang untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak konsumen. Undang Undang mengatur pihak yang terlibat dalam jual beli rumah akan mendapatkan perlindungan hukum apabila mempunyai bukti tertulis dalam suatu ikatan perjanjian jual beli perumahan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan oleh karena itu kekuasaan harus tunduk pada hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu: 1. Bagaimana Prinsip dasar Perlindungan Hukum Konsumen Bidang Perumahan dengan Sistem Syariah apabila terjadi wanprestasi dilakukan oleh salah satu pihak. 2. Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Kasus Perlindungan Hukum Konsumen bidang Perumahan dengan Sistem Syariah. Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1. Indonesia sebagai Negara Hukum, Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap konsumen. dimana pemerintah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga Negara Pada Kasus wanprestasi ini konsumen sebagai pembeli salah satu perumahan sudah dirugikan oleh pihak developer sudah melakukan gugatan di Pengadilan Agama ini sudah Sesuai Undang-Undang dimana dapat dilakukan Upaya Hukum jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian salah satunya dengan melakukan Gugatan di Persidangan. 2. Putusan Hakim Terhadap Kasus Perlindungan Hukum Konsumen bidang Perumahan. Dalam putusan ini permohonan pelawan ditolak oleh hakim dengan alasan tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanah dan rumah berupa sertifikat Tapi dalam memberikan putusan ini menurut peneliti hakim belum memberikan putusan maksimal. Padahal tanah dan rumah sudah ditempati oleh Para Pembanding dan keluarganya semestinya keterangan ini seharusnya sudah menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim, karena tidak selalu alat bukti dibuktikan dengan alat tulis tapi ada kalanya alat bukti bisa di hadirkan dengan kesaksian saksi.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Keputusan Hakim

ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS ON CONSUMER PROTECTION CASES WITH THE SHARIA SYSTEM IN BUKITTINGGI RELIGIOUS COURT

Muhammad Nur Idris , 2120113017 Postgraduate Program, Faculty of
Law, Andalas University, 2023, 124 Pages)

ABSTRACT

Rapid population development and unstable economic development have an impact on the difficulty for individuals to be able to have decent housing. To meet the need for good and livable housing, people buy housing through housing developers. However, in the development of the housing business it can become an opening for developers to take actions that are detrimental to the consumer. The law regulates that parties involved in buying and selling houses will receive legal protection. if you have written evidence in a housing sale and purchase agreement. Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution states that the State of Indonesia is a state based on law. That is, Indonesia is not based solely on power and therefore power must be subject to the law so that arbitrariness does not occur. Based on the background of the problems described above, the problem under study can be formulated, namely: 1. What are the basic principles of consumer legal protection in the housing sector with a system Sharia in the event of default is carried out by one of the parties. 2. What is the Judge's Decision on Consumer Legal Protection Cases in the Housing Sector with the Sharia System. In the research, the writer used an empirical juridical approach, which is descriptive in nature. From the results of this study, it is known that: 1. Indonesia as a rule of law, laws and regulations have provided a basis for legal protection for consumers. where the government guarantees legal certainty to provide protection to citizens. one of which is by filing a lawsuit at trial. 2. Judge's Decision on the Case of Consumer Legal Protection in the Housing Sector. In this decision, the judge rejected the contestant's application on the grounds that he did not have proof of land and house ownership in the form of a certificate. Even though the land and houses were already occupied by the Appellant and their families, this statement should have served as guiding evidence for the Panel of Judges, because evidence is not always proven by means of writing, but sometimes evidence can be presented by witness testimony.

Keywords: Consumer Protection, Judge's Decision